

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnian, Agustin, Y., Faisal, A., Susanti, R., Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Penerbit Laduny.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Erlina. (2021). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Ismoyo, J. D. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jayadi, H. (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Martien, H. D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muliadi, H. A. (2015). *Hak-Hak Atas Tanah Kajian Peruntukan, Pemeliharaan dan Penatagunaan Tanah dalam Sistem Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional*. Jakarta: Erzatama Karya Abadi.
- Muwahid. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.

Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Romli, H. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.

Saraswati, R. (2024). *Hukum Benda*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Yazid, F. (2020). *Pengantar Hukum Agraria*. Medan: Undhar Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Asnawi, M. N. (2017). Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah - Masalah Hukum*, 55-68.

Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Camat dalam Kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 905–916.

Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2021b). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 486–494.

Dewi, M. A. P., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Notariil Pada Proses Jual Beli Hak Atas Tanah Di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan. *Journal Komunikasi Yustisia*, 123–133.

- Hamdaliah. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 150–169.
- Hansun, M. H. (2016). Kajian Yuridis Peralihan Hak atas Tanah. *Lex Administratum*, 145-153.
- Helandri, J. (2016). Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 123–134.
- Hulu, K. I., & Telaumbanua, D. (2022). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua. *Jurnal Panah Keadilan*, 52–61.
- Jundi, A. M., Fuad, F., Sadino, & Mahasari, J. (2024). Land Redistribution After the Issuance of Presidential Regulation Number 62 of 2023 on Acceleration of Agrarian Reform Implementation. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 730–744.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 57-65.
- Kasenda, D. G. (2015). Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Morality*, 1–21.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 115–124.
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 298-321.
- Mujiati, & Aisiyah, N. (2014). Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten Boyolali. *Bhumi*, 457-469.
- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn*, 29-45.
- Nurjannah. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Induk Landreform. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 193–205.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 18-28.

- Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 280-287.
- Pulungan, M. T., & Muazzul. (2017). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 60-71.
- Putra, P. A. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 57-74.
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia*, 298-325.
- Salam, S. (2018). Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Nurani Hukum*, 33-44.
- Sapriadi. (2015). Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 364-381.
- Shofianingrum, R., & Sudirman, M. (2024). Implikasi Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. *Jurnal USM Law Review*, 1952-1966.
- Simbolon, D. H., & Isnaini. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 36-43.
- Suartining, N. K., & Djaja, B. (2023). Land Rights in the Land Law System in Indonesia According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. *Journal of Social Research*, 1775-1785.
- Sudiarto, B. (2021). Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA. *Al-Qisth Law Review*, 1-43.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2463-2478.
- Zakie, M. (2016). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Legality*, 40-55.

ARTIKEL DALAM INTERNET

- Adi, M. (2025). Sentuh Tanahku Hadir dengan Beragam Fitur Baru, Permudah Akses Layanan Pertanahan Digital. Diambil 2 Juni 2025, dari

<https://www.atrbpn.go.id/berita/sentuh-tanahku-hadir-dengan-beragam-fitur-baru-permudah-akses-layanan-pertanahan-digital>

Adityo, H. I. (2024). Kriteria Pembeli Beriktikad Baik dalam Jual Beli Tanah. Diambil 13 April 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-pembeli-beriktikad-baik-dalam-jual-beli-tanah-lt668bb65a403b5/>

Hamid, Z. S. M. (2023). Mengenal Konsep Ganti Rugi dalam Perkara Perdata. Diambil 23 September 2024, dari <https://heylaw.id/blog/mengenal-konsep-ganti-rugi-dalam-perkara-perdata>

Hasan, F. (2024). Apa yang Dimaksud dengan Misbruik van Recht dan Mengapa Misbruik van Recht Dapat Merusak Penegakan Etika. Diambil 23 September 2024, dari <https://www.fokus.co.id/edu/apa-yang-dimaksud-dengan-misbruik-van-recht-dan-mengapa-misbruik-van-recht-dapat-merusak-penegakan-etika>

Pahlevi, A. A. (2020). Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan Prosedurnya. Diambil 2 Juni 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya-lt5ee0668e6b036/>

Thea, A. (2023). Terbit Perpres Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Begini Materinya. Diambil 2 April 2025, dari <http://hukumonline.com/berita/a/terbit-perpres-percepatan-pelaksanaan-reforma-agraria--begini-materinya-lt652349474f38b/?page=2>

SKRIPSI

Aryanto, D. T. (2021). *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah dalam Jual Beli Tanah Sengketa di Kabupaten Grobogan*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Rosita, I. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 121/PDT.G/2017/PN.BDG)*. Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Sandi, N. P. G. D. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng*. Fakultas Hukum dan Ilmu Soisal, Universitas Pendidikan Ganesha.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Pemerintah Hindia Belanda.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2021. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023. Sekretariat Negara. Jakarta.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 170/PDT/2019/PT.Dps.